Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Selasa 11 Februari 2025
Wilayah	Kabupaten Maros

## Anggaran Dipangkas, Infrastruktur Terhambat

## Anggaran Dipangkas, Infrastruktur Terhambat

MAROS, FAJAR — Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros terancam tertunda. Hal ini menyusul dengan adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Maros yang nilainya mencapai Rp80 Miliar. Akibatnya, sejumlah proyek in-

Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda. Pemkab Maros tengah menyisir anggaran yang bisa diefisiensikan.

"Untuk efisiensi anggaran, kita sedang menyisir beberapa kegiatan di sektor lain. Sudah ada sekitar Ro30 miliar sindah kita efisilah ensikan," kata Bupati Maros, AS Chaidir Syam, Senin, 10 Februari 2025.

Diharapkan, dari proses efisiensi ini bisa mencapai angka Rp80 miliar. Alasannya, agar bisa mengalokasikan anggaran untuk masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang harus dituntaskan. "Kemudian juga irigasi yang juga jadi prioritas," jelasnya.

Efisiensi yang dilakukan di sektor lain, dari anggaran perjalanan dinas atau kegiatan pelatihan yang bisa ditunda atau menggunakan metode lainnya.

"Sekarang kita berusaha bagaimana agar efisiensi di sektor lain ini bisa dilakukan dan menutupi pembangunan infrastruktur prioritas yang anggarannya dihapuskan. Misalikan pelatihan yang bisa di-hold atau ditunda tahun depan," sebutnya

Dari pemangkasan 50 persen atau sekitar Rp80 miliar, terdampak paling besar Dinas PUTRPP. Terpangkas sekitar Rp60 miliar. Padahal, itu untuk pembangunan DAK jalan, jembatan, dan irigasi.

DAK jalan, jembatan, dan irigasi. "Kita dihilangkan sepenuhnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat efisiensi anggaran dari sektor lain," jelasnya.

Olehnya itu kata dia, salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.

Akan tetapi untuk, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.

Pit Kepala Dinas PUTRPP Muhammad Alfian Amri mengatakan tahun ini pihaknya terdampak pemangkasan anggaran. Program yang masuk dalam DAK dan DAU Earmarking semua habis ternangkas.

bis terpangkas,
Proyek Jalan, Irigasi, dan beberapa ruas jembatan tak jadi dikerjakari. Makanya sekarang sedang dicarikan alokasi dana dari kegiatan lain yang tidak mendesak sifatnya," jelasnya. (rin/zuk)